DOKUMEN PERENCANAAN

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

(R E N J A)

KECAMATAN MOJOTENGAH

KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN 2027

Jl. Hasyim As'ary No.2, Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 ini. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, serta memperhatikan ketentuan umum tata cara perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini merupakan hasil penyempurnaan atas rancangan awal dan rancangan Renja Perangkat Daerah setelah memperhatikan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, musrenbang RKPD, serta penyelarasan akhir terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027, sebagai dasar penetapan Renja Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2027 guna mendukung pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Wonosobo, 27 Juli 2026

Camat Mojotengah



EKO WIDI NUGROHO, S.STP., M.Si.

NIP. 19860307200602 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
1.3.2 Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2026
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mojotengah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD). Renja OPD Kecamatan Mojotengah merupakan dokumen perencanaan OPD Kecamatan Mojotengah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat. RKPD Tahun 2026 menjadi rencana tahun kedua RPJMD 2025 – 2029,

Arah kebijakan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 merupakan implementasi tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dengan tema **"Modernisasi dan Hilirasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan".** Tahun 2027 ini merupakan tahap **"Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata"** guna pencapaian Visi **"Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur"**.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra Perangkat Daerah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada di atasnya seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah (PD) secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan reviu hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu, berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan

rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan MojotengahKabupaten Wonosobo Tahun 2027 memuat berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029 dan merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Mojotengah tahun kedua. Renja Kecamatan Mojotengah Tahun 2027 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Kecamatan Mojotengah Tahun 2027 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo selama tahun 2027.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan dalam penyusunan Rencana Akhir Kerja Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi di Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
17. Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola riset dan inovasi di daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2022/Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023: (Perubahan atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021), dan diubah kembali dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024: (Perubahan Kedua atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Mojotengah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo tahun 2027 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo secara berkesinambungan.

1.3.1 Maksud

Untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo tahun 2027 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Mojotengah tahun 2027;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2027 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisi penjelasan mengenai dasar penyusunan Renja, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, serta fungsi Renja sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama satu tahun anggaran

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Mojotengah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Mojotengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Mojotengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Mojotengah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2027

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mojotengah tahun 2027 dan perkiraan capaian tahun 2028, mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mojotengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.3 Isu -isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi uraian mengenai berbagai kondisi strategis, permasalahan, tantangan, peluang, serta isu aktual yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mojotengah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Isinya menjelaskan proses penelaahan terhadap usulan masyarakat yang diperoleh melalui mekanisme perencanaan partisipatif, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hasil reses DPRD, aspirasi masyarakat, maupun usulan dari desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya dijelaskan bagaimana usulan tersebut diseleksi dan

disesuaikan dengan kewenangan Kecamatan, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojotengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/sub kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program/kegiatan/sub kegiatan meliputi program, kegiatan, dan subkegiatan. Lokasi kegiatan, dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan uraian ringkas dan garis besar mengenai program dan kegiatan yang diusulkan, penjelasan mengenai faktor-faktor penentu atau pertimbangan yang menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Mojotengah.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan; serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN MOJOTENGAH

TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojotengah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mojotengah

Evaluasi capaian kinerja bidang urusan Kecamatan Mojotengah Tahun 2025 merupakan bagian dari proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Mojotengah Tahun 2025–2029. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun pertama Renstra melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sekaligus menjadi dasar penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Mojotengah Tahun 2027.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mojotengah menunjukkan capaian yang baik. Sebagian besar target indikator telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Perangkat Daerah. Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum.

Dari aspek Indikator Kinerja Utama (IKU), kinerja Kecamatan Mojotengah menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan, terutama yang berkaitan dengan penguatan peran kecamatan dalam koordinasi pembangunan wilayah, percepatan penanganan kemiskinan, pengembangan potensi agrobisnis dan pariwisata, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Selanjutnya, berdasarkan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagian besar indikator yang menjadi kewenangan kecamatan telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum optimal akibat adanya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan pemerintah, serta perlunya peningkatan sinergi dengan perangkat daerah teknis dan pemerintah desa.

Hasil evaluasi Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2027. Perencanaan Tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat koordinasi kewilayahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan desa, serta mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029.

Rencana Belanja Daerah Kecamatan Mojotengah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.727.815.948,00 dapat direalisasi Rp 6.378.310.942,00 atau 94,80 %, terdiri dari Belanja Operasional direncanakan sebesar Rp 6.272.614.948,00 dapat direalisasi sebesar Rp 5.926.475.763,00 atau 94,48 % dan Belanja Modal direncanakan Rp 455.201.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 451.835.179,00 atau 99,26%. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Mojotengah melaksanakan 5 (lima) program, 13 kegiatan, dan 29 sub kegiatan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 tersebut dengan rata-rata capaian/realisasi fisik sebesar 100%.

Tujuan Kecamatan Mojotengah sesuai Renstra Tahun 2025-2029 adalah: "**Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan"** dengan indikator "**Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja**". Tujuan Kecamatan Mojotengah dicapai melalui 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pembangunan;
2. Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Sasaran strategis **Meningkatnya kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah** dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ditujukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Perangkat Daerah.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Mojotengah dan pencapaian Renstra Kecamatan Mojotengah sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojotengah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mojotengah s/d Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8
7					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
7	1				PERENCANAAN						
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
						Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	N/A	N/A	90	N/A	N/A
						Persentase keterisian data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%
						Nilai hasil pengawasan kearsipan	N/A	N/A	60	N/A	N/A

						Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7	*1*	*1*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 ASN/bulan	31 ASN/bulan	33 ASN/bulan	31 ASN/bulan	100%
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi RKPD	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100%
7	*1*	*1*	*2.07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan derah*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	10 unit	0 unit	0 unit	100%
7	*1*	*1*	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%
7	*1*	*1*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*	*Persentase realisasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	100%
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang terlaksana sesuai ketentuan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						ndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik kecamatan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diselesaikan tepat waktu	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
						Persentase penyelesaian pelayanan administrasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7	*1*	*2*	*2.01*		*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Persentase dokumen perencanaan yang disusun*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16 laporan	16 laporan	16 laporan	16 laporan	100%
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%
7	*1*	*2*	*2.03*		*Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	*Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum yang terkoordinasi pemeliharaannya*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%
7	*1*	*2*	*2.04*		*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	*Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan sesuai ketentuan*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

						Persentase desa yang meningkat status pemberdayaan masyarakatnya	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase hasil pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7	*1*	*3*	*2.01*		*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Persentase desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan sesuai hasil koordinasi*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100%
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kecamatan dan kelurahan yang terlaksana sesuai rencana	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
7	*1*	*3*	*2.02*	12	*Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	*100 Keluarga*	*100 Keluarga*	*100 Keluarga*	*100 Keluarga*	100%
7	1	4			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana sesuai rencana	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
						Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti melalui koordinasi	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
						Persentase desa/kelurahan yang memiliki kondisi aman dan tertib	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

						Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
						Tingkat penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
7	1	4	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai rencana	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	*100%*
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	*100%*
7	***1***	***5***			***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana sesuai ketentuan***	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

						Persentase pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana sesuai rencana	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output)**	**Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024**	**Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024**	**Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025**		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	**Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025**	**Tingkat Realisasi (%)**
						Persentase permasalahan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti melalui koordinasi	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
						Persentase kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan kerukunan masyarakat yang terlaksana	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
						Persentase pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan (Forkopimcam) sesuai rencana	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah -	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
						Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai rencana	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
						Persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah desa	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
						Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
						Persentase desa yang menyampaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa sesuai rencana	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
7	1	6	2.01	**2**	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	*100%*
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	*100%*
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	*100%*
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	*100%*
7	1	6	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	*100%*
7	1	6	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	*100%*

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Kecamatan Mojotengah pada tahun 2026 triwulan II adalah sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program

1. Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik mencapai 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian menjadi 100%;
2. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran mencapai 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian menjadi 100%;
3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) belum diketahui nilainya dari target nilai 90;
4. Nilai hasil pengawasan kearsipan belum diketahui nilainya dari target nilai 60;
5. Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD mencapai 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian menjadi 100%;
6. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian menjadi 100%;
7. Persentase ketersediaan dokumen evaluasi perencanaan mencapai 75% dari target 100%, sehingga persentase capaian mencapai 75%;
8. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian menjadi 100%;
9. Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian menjadi 100%;
10. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mencapai 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian menjadi 100%;
11. Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mencapai 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian menjadi 100%;
12. Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Perekonomian dan SDA mencapai 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian menjadi 100%;
13. Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan mencapai 25% dari target 20%, sehingga persentase capaian mencapai 125%;
14. Persentase Kajian/Riset Berbasis Bukti belum tersedia dari target 5%.

Berdasarkan capaian kinerja program, dari 14 indikator kinerja program terdapat:

1. 1 (satu) **indikator yang tidak memenuhi target** (kurang dari 100%) yaitu indikator Persentase ketersediaan dokumen evaluasi perencanaan. Persentase ketersediaan dokumen evaluasi perencanaan baru mencapai 75% karena pada saat dokumen Ranwal Renja Tahun 2027 dibuat, dokumen evaluasi baru selesai disusun sampai dengan Triwulan III Tahun 2025;
2. 12 (dua belas) **indikator yang telah memenuhi target** (100%), meliputi Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik, cakupan pelayanan administrasi perkantoran, persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah, Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD, Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA, Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Perekonomian dan SDA;
3. 1 (satu) **indikator yang melebihi target** (lebih dari 100%) yaitu Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan yang mencapai 25% dari target 20%. Pada capaian, terlihat bahwa pemerintah daerah telah memberikan support bagi pengembangan inovasi;
4. 4 (empat) **indikator yang tidak tersedia nilai capaiannya (N/A)** karena merupakan indikator baru pada RPJMD 2025-2029.

Faktor yang mempengaruhi capaian:

1. Pemanfaatan aplikasi Garasi Data Utama (GARDU) perencanaan untuk memastikan ketersediaan data dan informasi beserta proses verifikasi data dukung setiap indikator
2. Pemanfaatan SIPD-RI untuk memudahkan penginputan dan pengolahan data sesuai pedoman.
3. Kualitas dan kuantitas SDM yang memahami teknis pengelolaan data perencanaan dan evaluasi.

Perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat dengan dukungan rekomendasi berbasis riset yang relevan dengan isu-isu strategis daerah.

Informasi dan analisis yang dihasilkan dari berbagai kajian dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam merumuskan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Penekanan khusus perlu diberikan pada analisis daya saing daerah untuk memperkuat perencanaan sektor-sektor unggulan seperti pertanian dan pariwisata. Hasil kajian tersebut berfungsi untuk menilai efektivitas rencana yang telah dijalankan, mengidentifikasi area yang masih lemah, serta menyusun langkah perbaikan.

b. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1). Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, 2). Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah, dan

3) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

1) Penyusunan perencanaan dan pendanaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Musrenbang kabupaten dilaksanakan guna mendapatkan asupan dan usulan pembangunan partisipatif secara langsung dari masyarakat. Rangkaian kegiatan musrenbang meliputi Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Arah Kebijakan Umum Pembangunan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (FKP Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Desk Penyusunan Rancangan RKPD 2026, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Fasilitasi Musrenbang RKPD 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMPD) 2025-2029. Stakeholder yang terlibat adalah Kecamatan Mojotengah, seluruh Perangkat Daerah, seluruh kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi agama, organisasi masyarakat, perwakilan perempuan, dan perwakilan anak. Selain itu juga dilaksanakan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota melalui fasilitasi penyusunan RKPD 2026, Perubahan RKPD 2025, dan fasilitasi penyusunan RPJMD 2025-2029. Keluaran yang dihasilkan adalah 1 (satu) Dokumen RKPD 2026, 1 (satu) Dokumen Perubahan RKPD 2025, dan 1 (satu) Dokumen RPJMD 2025-2029.

2) Analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang

perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengoptimalkan dukungan data dan informasi sebagai bahan untuk menyusun perencanaan dan evaluasi melalui pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (PD). Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penambahan modul aplikasi evaluasi dan monitoring kinerja pada Gardu Perencanaan, fasilitasi koordinasi Satu Data Tingkat Kabupaten Wonosobo dan rapat perencanaan data kepada seluruh perangkat daerah.

3) Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengkoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan secara berkala kinerja pembangunan dan sebagai dasar penyusunan kebijakan perencanaan, melalui monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat evaluasi perencanaan daerah dan pengisian aplikasi Gardu Perencanaan kepada seluruh Perangkat Daerah sebanyak 4(empat) kali.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Wonosobo. Kecamatan Mojotengah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan proses perencanaan pembangunan di tingkat wilayah melalui fasilitasi, sinkronisasi, dan harmonisasi usulan pembangunan dari pemerintah desa dengan prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan program ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, perangkat daerah, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Selain itu, program ini bertujuan memastikan bahwa usulan pembangunan yang dihasilkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, didukung oleh data yang akurat, serta selaras dengan dokumen RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan kebijakan pembangunan daerah lainnya.

Melalui program ini, Kecamatan Mojotengah juga melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, verifikasi dan sinkronisasi usulan pembangunan desa, koordinasi lintas sektor,

serta monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil perencanaan pembangunan. Dengan demikian diharapkan kualitas perencanaan pembangunan semakin efektif, efisien, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Wonosobo.

Keberhasilan pelaksanaan program diukur melalui indikator **Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terlaksana Sesuai Rencana**, dengan target pelaksanaan sebesar **100 persen** pada Tahun 2027. Pencapaian indikator tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas koordinasi pembangunan kewilayahan, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, terpadu, dan berkelanjutan.

3. Program Riset dan Inovasi Daerah

Program Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan berbasis data dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di Kecamatan Mojotengah. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil kajian, inovasi, dan pengembangan teknologi sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan program difokuskan pada pengembangan inovasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur dalam membangun budaya inovasi, identifikasi dan pengembangan potensi wilayah, serta fasilitasi implementasi berbagai inovasi yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Kecamatan Mojotengah mendorong pemanfaatan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan serta memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah, pemerintah desa, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengembangan inovasi daerah. Melalui program ini diharapkan tercipta inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi pemerintahan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal, khususnya pada sektor agrobisnis, UMKM, dan pariwisata yang menjadi potensi unggulan Kecamatan Mojotengah. Keberhasilan pelaksanaan program diukur melalui indikator **Persentase Inovasi Daerah yang Diimplementasikan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, dengan target pelaksanaan sebesar **100 persen** pada Tahun 2027. Melalui pencapaian indikator tersebut diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan Kecamatan Mojotengah yang semakin inovatif, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada

masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Wonosobo.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, meliputi:

c. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

i) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah antara lain meliputi penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Aksi (Renaksi)

ii) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah antara lain meliputi penyusunan dokumen evaluasi kinerja dan keuangan seperti dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan POBL, laporan rekonsiliasi kas dan keuangan baik triwulan, semester, maupun laporan keuangan tahunan (LKD), serta laporan capaian kinerja triwulan melalui aplikasi Gardu Perencanaan.

d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini berupa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Mojotengah selama tahun 2025

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) Sub kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan untuk Fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD dinas luar kota dan dalam kota

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pada tahun 2025

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu: Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada sub kegiatan ini dilaksanakan untuk Honorarium Pelaksana transaksi keuangan, Honor tenaga

administrasi non ASN, Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor, iuran BPJS non ASN, Penyediaan media iklan media massa, dan pelaksanaan Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor Kecamatan Mojotengah bekerja sama melalui pihak ketiga PT Luvina Padma Persada dan PT Integritas Tata Insani

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, termasuk suku cadang, minyak pelumas dan BBM

i. Pemeliharaan Mebel
ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pada sub kegiatan ini digunakan untuk Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor dan perlengkapan kantor
iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pada sub kegiatan ini digunakan untuk Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

a. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian indikator kinerja tahun 2025 berada pada kriteria sangat tinggi, keberhasilan pencapaian tersebut disebabkan antara lain:

1. Adanya konsolidator sebagai sarana untuk fasilitasi asistensi dokumen perencanaan;
2. Kapasitas dan kompetensi perencana sebagai SDM pendukung perencanaan;
3. Adanya aplikasi gardu perencanaan sebagai pengukur kinerja Perangkat Daerah untuk capaian indikator program;
4. Adanya timeline tahap perencanaan yang dipatuhi dan diimplementasikan.

Namun di sisi lain, hal yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah selama ini penyusunan kebijakan pembangunan dalam berbagai dokumen perencanaan belum berbasis bukti atau yang disebut sebagai *evidence based policy*. Untuk itu perlu dilakukan penguatan terhadap urusan penelitian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti sebagai masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojotengah

Kecamatan Mojotengah merupakan perangkat daerah yang mengampu unsur penunjang urusan Pemerintahan yang memiliki fungsi dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan memiliki peran dalam pencapaian misi ke-8 RPJMD 2025-2029, yaitu:

"Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat)".

Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**.**Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Kecamatan Mojotengah bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo

Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Restra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	35,00	N/A	40,00	40,00	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	72,00	74,00	74,00	75,00	63,11	N/A	74,00	75,00	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	-	-	92,00	92,00	92,00	93,00	89,55	N/A	90,00	90,00	

Pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mojotengah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran "***Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah***" memiliki 3 (tiga) indikator yaitu "**Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah**" nilai realisasinya sebesar 35 dari target sebesar 40 dengan capaian kinerja sebesar 87,5 %, indikator "Nilai SAKIP" realisasinya sebesar 63,11 dari target 72,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 87,6 %, sedangkan indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" realisasinya sebesar 89,55 dari target sebesar 92,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,33%.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, Kecamatan Mojotengah masih menghadapi beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Isu-isu tersebut antara lain sebagai berikut:

1. **Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.**
   Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital semakin meningkat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kompetensi aparatur masih menjadi prioritas.
2. **Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.**
   Peran kecamatan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan desa, instansi vertikal, dan lintas sektor perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan lebih efektif, terpadu, dan tepat sasaran.
3. **Masih perlunya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa.**
   Pemerintah desa masih memerlukan pendampingan dalam aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, administrasi pemerintahan, penyusunan produk hukum desa, serta pengelolaan aset desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa.**
   Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan masyarakat,

memerlukan koordinasi yang lebih intensif dengan Forkopimcam, pemerintah desa, aparat keamanan, serta unsur masyarakat guna menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif.

6. **Belum optimalnya pengarusutamaan potensi agrobisnis dan pariwisata sebagai penggerak pembangunan wilayah.** Kecamatan Mojotengah memiliki potensi pertanian hortikultura, peternakan, UMKM, dan pariwisata yang perlu dioptimalkan melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan promosi, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
7. **Perlu peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.** Perencanaan berbasis data, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta penguatan akuntabilitas kinerja perlu terus ditingkatkan untuk mendukung tercapainya target RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
8. **Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.** Digitalisasi administrasi pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan data, dan sistem pelaporan masih perlu ditingkatkan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
9. **Perlu penguatan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.** Sinkronisasi data sosial, koordinasi program lintas perangkat daerah, serta validasi data penerima bantuan masih menjadi tantangan dalam mendukung penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. **Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).** Pengembangan kompetensi, disiplin, integritas, budaya kerja, dan inovasi pelayanan aparatur menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, serta Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah teknis. Meskipun Kecamatan Mojotengah bukan merupakan Perangkat Daerah teknis, namun Kecamatan Mojotengah juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan, dan mengakomodir usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. RPJMN ini menjadi landasan awal dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**, melalui berbagai agenda pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Sebagai tahap awal menuju Indonesia Emas 2045, RPJMN Tahun 2025–2029 menitikberatkan pada pelaksanaan berbagai agenda transformasi yang bertujuan meningkatkan daya saing bangsa.

Transformasi tersebut mencakup penguatan pembangunan sosial, percepatan transformasi ekonomi, reformasi tata kelola pemerintahan, penguatan supremasi hukum, stabilitas nasional dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global, peningkatan ketahanan sosial, budaya dan lingkungan, pemerataan pembangunan wilayah beserta infrastruktur pendukungnya, serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut, pemerintah menetapkan delapan prioritas nasional yang merupakan penjabaran dari delapan misi Presiden (Asta Cita). Prioritas tersebut meliputi penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia; peningkatan ketahanan pertahanan dan keamanan negara yang didukung kemandirian di bidang pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas serta penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim; peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; penguatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam; pembangunan yang berorientasi pada desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan; penguatan reformasi birokrasi, hukum, politik, serta pemberantasan korupsi, narkoba, perjudian, dan penyelundupan; serta pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, pelestarian budaya, dan penguatan kerukunan antarumat beragama.

Pada periode pembangunan tahun 2025–2029, pemerintah memfokuskan pencapaian pada tiga sasaran pembangunan nasional, yaitu menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui berbagai indikator kinerja nasional, antara lain penurunan tingkat kemiskinan hingga kisaran 4,5–5 persen, peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi sekitar 0,59, serta pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai sekitar 8 persen pada akhir periode RPJMN tahun 2029. Selain itu, pembangunan nasional juga diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

"JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN
UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045". Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah;
7. Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah **"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan"** yang akan dicapai dengan tiga sasaran pembangunan daerah meliputi:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter;

Tahun 2027 merupakan tahap **"Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah"** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun ke depan. Tahun kedua difokuskan pada tema pembangunan yaitu **"Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi"**. Selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap kedua diarahkan pada prioritas daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
2. Peningkatan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter. Memperhatikan prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka tema pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 adalah "**Integrasi Agrobisnis dan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah**". Arah prioritas untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2027

adalah sebagai berikut:

1. Penguatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang berdaya saing dan inklusif;
2. Penurunan ketimpangan pendapatan;
3. Penguatan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas;
4. Peningkatan kesejahteraan sosial dan kemandirian sosial ekonomi;
5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif;
6. Penguatan harmonisasi keberagaman;
7. Penguatan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan;
8. Penguatan upaya kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
9. Penguatan ketahanan iklim dan bencana;
10. Pelestarian warisan budaya daerah dan cagar budaya

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mojotengah

Renja Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama Renstra Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja

Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

Tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2029-2029 yaitu: "**Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan**" dengan indikator tujuan: "**Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja**". Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo yaitu:

"Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pembangunan" dan "Meningkatnya kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah"

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Ssaran	Target
1	**Tujuan:** Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, koordinasi kewilayahan, dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	94,00
2	**Sasaran:** a. Meningkatnya efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan yang terlaksana sesuai rencana	100%
	b. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal dan Pemerintahan yang akuntabel.	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	40,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,00
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,00

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Mojotengah adalah "Mewujudkan perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja". Sedangkan arah kebijakan tahun 2027 adalah "menguatkan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja". Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

1. penguatan kompetensi sumber daya manusia Perencana
2. pelaksanaan musrenbang tematik
3. peningkatan kualitas data dan informasi
4. monitoring dan evaluasi aplikasi kinerja untuk mendukung satu data
5. penguatan sinergitas dengan stakeholder terkait
6. penguatan perencanaan Perangkat Daerah berbasis data dan prioritas daerah
7. penyelenggaraan forum diskusi komunitas
8. sinkronisasi perencanaan tahunan daerah dengan RPJMD
9. penguatan penerapan standar pengisian data dan informasi untuk perencanaan sesuai prinsip Satu Data Indonesia
10. sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan

11. Internalisasi hasil riset dan inovasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Mojotengah Tahun 2027 disusun sebagai instrumen pelaksanaan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada Renstra Kecamatan Mojotengah Tahun 2025–2029, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029, serta prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027. Penyusunan program dan kegiatan juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, kebutuhan masyarakat, kondisi kewilayahan, serta kemampuan keuangan daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, koordinasi pembangunan kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, serta terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif. Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi antara Kecamatan, Pemerintah Desa, perangkat daerah terkait, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Wonosobo.

Pada Tahun 2027, Kecamatan Mojotengah melaksanakan program yang meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Masing-masing program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun berdasarkan nomenklatur yang berlaku serta disertai indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, dan pagu indikatif sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian kinerja.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Mojotengah semakin meningkat, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan semakin efektif, kapasitas pemerintahan desa semakin baik, partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin kuat, serta tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 serta mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Kecamatan Mojotengah Tahun 2025–2029 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama Tahun 2027. Penyusunan rencana kerja ini mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, isu-isu strategis, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.

Rencana kerja disusun untuk memastikan keterpaduan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, terarah, dan akuntabel. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Wonosobo sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029.

Pada Tahun 2027, Kecamatan Mojotengah melaksanakan program yang meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program-program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan nomenklatur yang berlaku, disertai indikator kinerja, target capaian, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, dan pagu pendanaan sebagai dasar pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja.

Pendanaan program dan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan penganggaran yang berlaku. Pengalokasian anggaran dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil (result oriented), sehingga setiap rupiah yang dialokasikan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa, dan pembangunan kewilayahan di Kecamatan Mojotengah.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi Kecamatan Mojotengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2027 sekaligus sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah. Dengan perencanaan yang terarah dan dukungan pendanaan yang memadai, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Mojotengah dapat berjalan secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, masyarakat yang berdaya, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Secara rinci rumusan program dan kegiatan Renja Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 sebagaimana tabel 4.1.1 berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN MOJOTENGAH KAB. WONOSOBO
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Kecamatan Mojotengah						**4.926.878.426,00**								**4.842.196.468,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.926.878.426,00**								**4.842.196.468,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.926.878.426,00**								**4.842.196.468,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.365.311.620,00**								**4.369.369.176,00**	
			-	-		-	-	4.358.311.620,00							-	4.369.369.176,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00						-		4.000.000,00	
		-						4.000.000,00						-		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.000.000,00							-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.000.000,00							-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	3.000.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			1.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.000.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.986.740.480,00						-		3.986.740.480,00	
		-						3.986.740.480,00						-		3.986.740.480,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.986.740.480,00							-	3.986.740.480,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.986.740.480,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			3.986.740.480,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	29 Orang/bulan	3.986.740.480,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	3.986.740.480,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						74.951.140,00						-		80.724.600,00	
		-						74.951.140,00						-		80.724.600,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.020.000,00							-	1.020.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	26.000.000,00							-	34.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	13.014.679,00							-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.000.000,00							-	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	19.211.861,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	8.704.600,00							-	8.704.600,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			7.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	7.000.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19.211.861,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	19.211.861,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	20.000.000,00	Kecamatan Mojotengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.704.600,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			8.704.600,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.704.600,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	8.704.600,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.014.679,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	13.014.679,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	10.000.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.020.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			1.020.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	1.020.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.020.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						26.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			34.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	26.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	34.000.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.000.000,00						-		97.404.096,00	
		-						7.000.000,00						-		97.404.096,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	7.000.000,00							-	97.404.096,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			97.404.096,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	20 Unit	7.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	97.404.096,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						173.620.000,00						-		131.500.000,00	
		-						173.620.000,00						-		131.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	16.840.000,00							-	22.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	155.280.000,00							-	107.160.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.500.000,00							-	1.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	150 Laporan	1.500.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.500.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.840.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			22.840.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	16.840.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	22.840.000,00	Kecamatan Mojotengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						155.280.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			107.160.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	155.280.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	107.160.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						119.000.000,00						-		69.000.000,00	
		-						119.000.000,00						-		69.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	65.000.000,00							-	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	45.000.000,00							-	45.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	9.000.000,00							-	9.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						45.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	11 Unit	45.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	45.000.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			9.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	9.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	9.000.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						65.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	4 Unit	65.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	15.000.000,00	Kecamatan Mojotengah
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**117.386.190,00**								**139.459.000,00**	
			-	-		-	-	117.386.190,00							-	139.459.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						31.149.970,00						-		41.481.270,00	
		-						31.149.970,00						-		41.481.270,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	31.149.970,00							-	41.481.270,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						31.149.970,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			41.481.270,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	2 Laporan	31.149.970,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	41.481.270,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						17.000.000,00						-		18.000.000,00	
		-						17.000.000,00						-		18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-		-	-	17.000.000,00							-	18.000.000,00	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						17.000.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-		-	2 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	18.000.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						69.236.220,00						-		79.977.730,00	
		-						69.236.220,00						-		79.977.730,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	69.236.220,00							-	79.977.730,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						69.236.220,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			79.977.730,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	22 Laporan	69.236.220,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	79.977.730,00	Kecamatan Mojotengah
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**169.215.896,00**								**157.679.711,00**	
			-	-		-	-	169.215.896,00							-	157.679.711,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						44.281.596,00						-		25.679.711,00	
		-						44.281.596,00						-		25.679.711,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	44.281.596,00							-	25.679.711,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						44.281.596,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			25.679.711,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	19 Laporan	44.281.596,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	25.679.711,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						26.034.300,00						-		27.000.000,00	
		-						26.034.300,00						-		27.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	-	16.717.000,00							-	17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	9.317.300,00							-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						9.317.300,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.317.300,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	10.000.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						16.717.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			17.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	1 Laporan	16.717.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	17.000.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						98.900.000,00						-		105.000.000,00	
		-						98.900.000,00						-		105.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-		-	-	98.900.000,00							-	105.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						98.900.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			105.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-		-	5000 Keluarga	98.900.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	105.000.000,00	Kecamatan Mojotengah
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**49.648.060,00**								**51.648.581,00**	
			-	-		-	-	49.648.060,00							-	51.648.581,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						49.648.060,00						-		51.648.581,00	
		-						49.648.060,00						-		51.648.581,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	49.648.060,00							-	51.648.581,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						49.648.060,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			51.648.581,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	6 Laporan	49.648.060,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	51.648.581,00	Kecamatan Mojotengah
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**119.489.500,00**								**40.000.000,00**	
			-	-		-	-	119.489.500,00							-	40.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						119.489.500,00						-		40.000.000,00	
		-						119.489.500,00						-		40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	119.489.500,00							-	40.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						119.489.500,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	1000 Orang	119.489.500,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	40.000.000,00	Kecamatan Mojotengah
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**105.827.160,00**								**84.040.000,00**	
			-	-		-	-	105.827.160,00							-	84.040.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						105.827.160,00						-		84.040.000,00	
		-						105.827.160,00						-		84.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	-		-	-	4.620.000,00							-	4.620.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	35.830.000,00							-	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	8.518.500,00							-	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	10.075.000,00							-	21.436.340,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	30.883.660,00							-	30.883.660,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	15.900.000,00							-	18.100.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						30.883.660,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			30.883.660,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	4 Dokumen	30.883.660,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.883.660,00	Kecamatan Mojotengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						15.900.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			18.100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	2 Dokumen	15.900.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	18.100.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						35.830.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	10 Dokumen	35.830.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						10.075.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			21.436.340,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	2 Dokumen	10.075.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	21.436.340,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga						4.620.000,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			4.620.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	-		-	0 Dokumen	4.620.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	4.620.000,00	Kecamatan Mojotengah
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						8.518.500,00			-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif			9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	12 Dokumen	8.518.500,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	9.000.000,00	Kecamatan Mojotengah
	J U M L A H							**4.926.878.426,00**								**4.842.196.468,00**	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja) Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang bersisi program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas serta sebagai tolok ukur untuk pencapaian target sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja) Kantor Kecamatan Mojotengah Tahun 2027 merupakan implementasi dan merupakan dokumen yang tidak terpisah dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojotengah Tahun 2025- 2029 Demikian dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Mojotengah Tahun 2027 yang dapat kami susun, semoga dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing stakholder di Kecamatan Mojotengah. Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 masih jauh dari yang diharapkan, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Renja pada tahun mendatang

Masukan, koreksi, dan penyempurnaan sangat diharapkan dalam proses finalisasi dokumen Renja, sehingga Kecamatan Mojotengah dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang semakin komprehensif, rasional, dan implementatif sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2027.

Wonosobo, 27 Juli 2026

Camat Mojotengah

EKO WIDI NUGROHO, S.STP., M.Si.
NIP. 19860307200602 1001